

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumni.
- M.A. Moegni. Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradiya Paramita.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi ketiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmad Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Salim HS. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Alumni.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ahmad Yani dan Rezky Amalia Syafiin. 2024. Menalar Pemilu Prosedural Dan Pemilu Substantif Sebuah Refleksi Menuju Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 2024 in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Anisa Isti Briliany dan Anajeng Esri Edhi M. 2021. Tinjauan Yuridis Perbuatan Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store. *Jurnal Yustika*, Vol. 24. No. 02.

- Baharuddin Riqiey. 2022. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1.
- Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Vol. 11 No. 1.
- I Wayan Cenik Ardika. 2025. Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan *E-Commerce*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 3.
- Kadek Rima Angren Suari dan I Made Sarjana. 2023. Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6 No. 1.
- Lidya Suyani Widayati. 2011. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum*, Vol. 2. No. 2.
- Martin Luther Manao dan Asmat Purba. 2022. Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. *Politeknik TEDC Bandung*, Vol. 16 No. 1.
- Muhammad Ihsan Abdurrahman dan Rosa Agustina. 2024. Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. *Lex Patriomonium*. Vol. 3 No. 1.
- Narisa Putri Apriani dan Rasji. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung). *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2.
- Nur Alfiana Alfitri, Rahmawati, Firmansyah. 2024. Perlindungan terhadap Data Pribadi di Era Digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Society*, Vol. 4. No. 2.
- Raudatul Makfirah, *et.al*. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 5.
- Sri Redjeki Slamet. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 2.
- Wahyu Nur Laili dan Muhammad Afandi. 2023. Analisis Pencatutan Data Diri dalam Keanggotaan Partai Politik dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5 No. 1.

Wilma Silalahi. 2020. Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No.1.

Yahya Zikra, dkk. 2021. *Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Melakukan Transaksi Online*. *Juris Studia*, Vol. 2 No. 2.

Tesis dan Disertasi

Yeni Septi Hastuti. 2011. Tinjauan terhadap Gugutan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006). Tesis. Universitas Indonesia.

Sri Laksmi Anindita. 2019. Valuasi Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Perkara Perdata. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sumber Internet

Agus Sahbani, Pengacara Parpol Ikut Berkibar di Ruang Sidang, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengacara-parpol-ikut-berkibar-di-ruang-sidang-lt56a06e286059a/> diakses pada 27 April 2025.

Anggi Muliawati. Bawaslu Terima 131 Aduan Pencatutan NIK di Pendaftaran Bacalon DPD, <https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd> diakses pada 4 Oktober 2024.

Desty Luthfiani. PBHI Terima 413 Aduan Soal Dugaan Pencatutan KTP Dukungan Dharma Pongrekun, <https://nasional.tempo.co/read/1906109/pbhi-terima-413->

aduan-soal-dugaan-pencatutan-ktp-dukungan-dharma-pongrekun diakses pada 3 Oktober 2024.

Dewan Pengurus Partai Kejadilan Sejahtera, PKS Resmikan Tim Hukum dan Advokasi Jelang Pemilu, <https://pks.id/content/pks-resmikan-tim-hukum-dan-advokasi-jelang-pemilu> diakses pada 27 April 2025.

Draf Rancangan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, https://pdp.id/bo/uploads/DRAF_RANCANGAN_PERATURAN_PEMERINTAH_TENTANG_PERATURAN_PELAKSANAAN_UU_NOMOR_27_TAHUN_2022_TENTANG_PELINDUNGAN_DATA_PRIIBADI_4d298e3f39.pdf diakses pada 20 Januari 2025.

Dutch Civil Code, <http://dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6611bb.htm#096> diakses pada 10 April 2025.

General Data Protection Regulation (GDPR) *Chapter VIII*, <https://gdpr-info.eu/chapter-8/> diakses pada 2 Februari 2025.

Kamila Meilina. Maraknya Pencatutan Data Pribadi untuk Pemilu Hingga Pilkada Jadi Sorotan, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/670d30ac419ca/maraknya-pencatutan-data-pribadi-untuk-pemilu-hingga-pilkada-jadi-sorotan> diakses pada 28 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/catut> diakses pada 5 Oktober 2024.

M. Prawiro. Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi. Maxmanroe, 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html> diakses pada 28 Januari 2025.

Normand Edwin Elnizar. Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat. Hukum Online.Com, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/> diakses pada 28 Januari 2025.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, <https://pdp.id/regulasi-ppdp> diakses pada 20 Januari 2025.

Rrustem Qehaja, “*Legal-Civil Aspect of Types of Immateril Damage*”, Iliria International Review, https://www.researchgate.net/publication/306528919_LegalCivil_aspect_of_types_of_Immateril_Damage diakses pada 26 April 2025.

Official iNews, Pilgub Jakarta: Heboh KTP Warga Dicatut Paslon, https://www.youtube.com/watch?v=rEoCopPXp_g diakses pada 21 Januari 2025.

Vitorio Mantalean. Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk daftar Pemilu, 3.198 Lolos, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu> pada 4 Oktober 2024.

Sumber Lain

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, n.d.).

Rosa Agustina. Peluang Gugatan Perdata untuk Satwa Liar Dilingkungi. (*Bahan Ajar*) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.